



## Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

### Laporan Kinerja Triwulan II Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo Tahun 2026

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan II tahun 2026.

#### A. Progress Capaian Kinerja

| Sasaran/Indikator                                                                                            | Target PK | Satuan | TW II  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|
|                                                                                                              |           |        | Target | Realisasi |
| [S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)                              |           |        |        |           |
| [IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI                                                                         | 99.6      | %      | 0      | 100       |
| [IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)                                                           | 94        | %      | 0      | 90.47     |
| [IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas                                             | 76.25     | Nilai  | 0      | 0         |
| [S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi                                       |           |        |        |           |
| [IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI                   | 59.5      | %      | 0      | 35.71     |
| [IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi                                          | 92.9      | %      | 0      | 59.52     |
| [S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan                        |           |        |        |           |
| [IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI                                    | 81        | %      | 0      | 35.7      |
| [IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya                                              | 124       | Orang  | 0      | 0         |
| [IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS | 59.5      | %      | 0      | 14.7      |
| [S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)                                   |           |        |        |           |
| [IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L                                                    | 99.9      | Nilai  | 0      | 99.71     |

#### B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

##### [S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

## **[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI**

### **Rencana Kegiatan/Aktivitas**

1. Social media monitoring dan respon
2. Publikasi Informasi Publik pada media sosial dan website
3. Publikasi Kegiatan dan Kinerja Internal LLDIKTI
4. Publikasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Website dan Media Sosial
5. Pengarsipan dan Backup Seluruh Arsip Dokumentasi Foto dan Video
6. Melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat sesuai aspek
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan (overtime, SD yang melaksanakan pelayanan)
- 8.

### **Progress/Kegiatan**

Pada Triwulan II periode April - Juni 2026, usulan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 104, dengan rincian rating:

Sangat Puas: 87 (84%)

Puas: 10 (10%)

Belum Unduh: 7%

Tapi dari total 97 usulan, 100% merasakan puas terhadap pelayanan aplikasi pada SIPINTER16 tanpa ada kendala teknis.

### **Kendala/Permasalahan**

Kepuasan pelayanan digital yang tercatat mencapai 100% menandakan tidak adanya kendala sejauh ini

### **Strategi/Tindak Lanjut**

Melakukan pemantauan dan perawatan rutin terhadap aplikasi SIPINTER untuk memastikan proses pelayanan berbasis digital di LLDIKTI Wilayah XVI berjalan lancar tanpa kendala agar skor kepuasan pengguna tetap dapat dipertahankan

## **[S 1] Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)**

## **[IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)**

### **Rencana Kegiatan/Aktivitas**

1. Asistensi Data Kelembagaan
2. Sosialisasi Layanan Usul Pembukaan Prodi / Perubahan PTS dan Pendirian PTS
3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (AMI Bitung, Akom Mapanwang, Akpar Manado)
4. Melakukan verifikasi dan validasi laporan dugaan plagiasi tesis S2 Manajemen Universitas Azis Lamadjido
5. Melakukan Legal Reasoning terkait permohonan a.n. Sitti Maghfirah (pemecatan dosen di Universitas Muhammadiyah Gorontalo )
6. Klinik Akreditasi
7. Layanan SIAGA

### **Progress/Kegiatan**

1. Melaksanakan Klinik Akreditasi sebagai penyelesaian kendala teknis pengajuan akreditasi Pada aplikasi SAPTO 2.0 BAN-PT. kegiatan dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan narasumber



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Dewan Eksekutif BAN-PT dan tim IT BAN-PT

2. Pemutakhiran data kelembagaan PTS yang mencakup sinkronisasi antara data kelembagaan resmi dengan data mandiri yang disampaikan oleh masing-masing PTS.
3. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang difokuskan pada tindak lanjut aduan masyarakat terhadap PTS yang berpotensi melakukan pelanggaran akademik.

### Kendala/Permasalahan

1. masih ada PTS yang belum memahami alur pelaksanaan akreditasi khususnya akreditasi PT pada SAPTO 2.0. selain itu klinik akreditasi juga mencatat 26 perguruan tinggi yang terdiri dari 13 PTS belum terakreditasi dan 13 PTS akan segera habis masa belaku akreditasi institutnya pada tahun 2026.
2. Sinkronisasi data kelembagaan dan data mandiri PTS masih ditemukan beberapa anomali, yang berpotensi mengganggu validitas data secara keseluruhan.
3. belum semua aduan masyarakat terhadap kinerja akademik PTS dapat ditindak lanjut dengan waktu yang singkat, dikarenakan keterbatasan anggaran, dan masih minimnya informasi serta data yang diperlukan untuk fasilitasi penyelesaian pelanggaran akademik

### Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pendampingan intensif dan melaksanakan sosialisasi instrumen akreditasi terbaru serta pelaksanaan simulasi asesmen kecukupan akreditasi untuk memberikan pemahaman secara utuh kepada PTS yang akan mengajukan akreditasi institusi
2. Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berkala, disertai koordinasi intensif dengan PTS terkait untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data kelembagaan.
3. Fokus pada perbaikan kinerja perguruan tinggi melalui kegiatan Integritas Akademik serta kepatuhan pelaporan PDDIKTI.

## [S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

### [IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas

### Rencana Kegiatan/Aktivitas

#### A. Pengelolaan SAKIP

1. Rapat Penyusunan dan Reviu Renstra 2025-2029
2. Rapat Evaluasi dan Tindak Lanjut SAKIP
3. Sosialisasi SAKIP
4. Rapat Penyusunan Rencana Aksi 2026
5. Rapat Evaluasi Capaian Kinerja TW I
6. Rapat Penyusunan Program Kerja Prioritas Tahun 2027

#### B. Pembangunan ZI WBK

1. Area Manajemen Perubahan : Rapat Evaluasi Pembangunan ZI WBK, Reviu Program Kerja Agen Perubahan
2. Area Penataan Tata Laksana : **Review Peta Proses Bisnis:** Menyinkronkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar unit kerja agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) , sosialisasi **Peta Proses Bisnis,**
3. Area Manajemen SDM Aparatur : Reviu Dokumen Reward dan Punishment
4. Area Penguatan Akuntabilitas : Kegiatan dilaksanakan relatif sama dengan Pengelolaan SAKIP
5. Area Penguatan Pengawasan : Pengumpulan evidence LKE, Penyusunan Laporan COI dan Laporan Penanganan Aduan Masyarakat, Penyusunan Laporan Aduan masyarakat dan WBS, rapat evaluasi Triwulan, Kampanye Antigratifikasi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

Berkala.

6. Area Pelayanan Publik : Melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat pada masing-masing aspek.

## **Progress/Kegiatan**

Dalam rangka pengelolaan SAKIP beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yakni:

1. Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II,
2. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2026
3. Sosialisasi SAKIP Tahun 2026

Progres kegiatan Triwulan II ZI- WBK

1. Melakukan Identifikasi terhadap pemenuhan LKE secara menyeluruh pada manajer area melalui laman inspirasi dikti baik yang memenuhi maupun yang belum
2. Terlaksananya Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan pada TW II periode 24 April – 18 Juni 2026 dengan jumlah responden 39 orang (melampaui target minimal 30 responden). Hasil survei menunjukkan mutu pelayanan Sangat Baik (A) dengan rincian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 98,21% dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sebesar 95,30%."

## **Kendala/Permasalahan**

1. Berdasarkan hasil penilaian TPSK terdapat 2 Area yang belum memenuhi yakni Area Perubahan dan Tata Laksana.
2. Mekanisme seleksi anggota tim kerja belum sepenuhnya berbasis prosedur yang mewakili seluruh unsur unit kerja secara terdokumentasi.
3. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi (monev), serta tindak lanjut pembangunan ZI dinilai belum sepenuhnya sesuai rencana dan memerlukan tambahan data dukung.
4. Bukti dokumentasi terkait keteladanan pimpinan sebagai role model dinilai belum memadai meskipun secara substansi sudah terlaksana.
5. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI dinilai belum tergambar sebagai keterlibatan yang penuh dan menyeluruh.
6. Meskipun hasil keseluruhan berkategori Sangat Baik, terdapat beberapa indikator pada SPKP yang memperoleh skor terendah (93,6%) dan memerlukan perhatian lebih lanjut, yaitu pada aspek: Informasi layanan, Ketepatan waktu, dan Kesesuaian tarif.
7. Hasil evaluasi internal TPSK menyatakan dokumen pemenuhan ZI belum memenuhi syarat kelulusan ambang batas pada 2 area yakni Area 1 (Manajemen Perubahan): Baru mencapai 4,00 dari nilai minimal 4,80 (terdapat selisih kekosongan nilai sebesar -0,80). dan Area 2 (Penataan Tatalaksana): Baru mencapai 3,43 dari nilai minimal 4,20 (terdapat selisih kekosongan nilai sebesar -0,77)

## **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melakukan seleksi anggota tim kerja ZI (kriteria, notulen, daftar hadir) yang menunjukkan keterwakilan lintas fungsi secara eksplisit.
2. Melaksanakan kegiatan dalam bentuk pendampingan di Triwulan III kepada seluruh manajer area baik yang memenuhi maupun yang belum termasuk Pemenuhan LKE dan buktin dukungnya.
3. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada responden yang memberikan skor sangat rendah pada unsur tarif/biaya layanan guna menelusuri akar permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

## **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

### **[IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI**

#### **Rencana Kegiatan/Aktivitas**

1. Workshop Penguatan Implementasi PPEPP (DARING)
2. Bimtek AMI (Hybrid)
3. Layanan Verifikasi Legalisir Ijazah untuk PTS Tutup
4. Layanan Verifikasi calon Wisudawan
5. Evaluasi Pelaporan Penyusunan Dok. SPMI bagi PTS pada Klaster 1 & 2
6. Monitoring Verifikasi Usulan Persyaratan Dokumen RPL pada Aplikasi Sierra oleh Verifikator RPL LLDIKTI

#### **Progress/Kegiatan**

Melaksanakan Kegiatan Workshop Penguatan Implementasi PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Belum meratanya kematangan SPMI antar-PTS. Sebagian PTS pada klaster bawah belum memiliki kelengkapan dokumen SPMI (kebijakan, manual, standar, dan formulir), sehingga materi penguatan siklus belum dapat langsung diterapkan.
2. Siklus PPEPP pada mayoritas PTS masih berhenti pada tahap Penetapan dan Pelaksanaan. Tahap Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan belum berjalan, dan Audit Mutu Internal (AMI) masih bersifat formalitas menjelang akreditasi.
3. Keterbatasan dan tingginya rotasi SDM pengelola LPM/UPM yang umumnya merangkap tugas struktural dan pengajaran, sehingga hasil workshop belum terinternalisasi secara kelembagaan.
4. Komitmen pimpinan PTS belum optimal. SPMI masih dipersepsikan sebagai pemenuhan syarat akreditasi, terlihat dari penugasan peserta yang tidak seluruhnya berasal dari unsur penjaminan mutu.
5. Rentang kendali tiga provinsi (Sulut, Gorontalo, Sulteng) serta kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2026 membatasi frekuensi pendampingan dan monev pascakegiatan secara luring.

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Menerapkan pembinaan berbasis klaster (differentiated treatment) mengacu pada hasil pemetaan Indeks Mutu Akademik (IMA): klaster bawah difokuskan pada pemenuhan dokumen dasar SPMI, klaster atas pada peningkatan berkelanjutan dan benchmarking.
2. Mengoptimalkan Fasilitator SPMI Wilayah sebagai pendamping klaster agar pembinaan berlangsung berkelanjutan dan tidak bergantung pada frekuensi kegiatan terpusat.
3. Menyelenggarakan pendampingan hibrida melalui klinik mutu daring secara berkala untuk menjangkau PTS di luar kota penyelenggara dengan pembiayaan yang efisien.
4. Memperkuat komitmen kelembagaan melalui surat edaran kepada pimpinan PTS agar menetapkan personel tetap pada unit penjaminan mutu melalui surat keputusan.
5. Mengintegrasikan materi penguatan PPEPP dengan implementasi OBE dan Permendiknas No 39 Tahun 2025 agar standar mutu bersifat operasional pada tingkat program studi.
6. Melaksanakan monev implementasi PPEPP pada Triwulan III untuk mengukur kelengkapan dokumen SPMI, keterlaksanaan AMI, dan tindak lanjut Rapat Tinjauan Manajemen, serta mendokumentasikan capaian setiap PTS dalam basis data/dasbor mutu wilayah.

## **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

### **[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi**



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

### Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Melakukan monitoring terhadap seluruh PTS yang sudah melakukan pembentukan Satgas PPKPT
2. Mengumpulkan dan merekap data awal / SK Satgas PPKPT

### Progress/Kegiatan

Melakukan pemberitahuan melalui zoom meeting kepada PTS terkait pembentukan Satgas PPKPT berdasarkan Permendikbustek No. 55 Tahun 2024

### Kendala/Permasalahan

1. Masih banyak PTS yang belum mengisi SK PPKPT pada link google drive
2. Masih banyak PTS yang masih belum membuat SK PPKPT (kebanyakan masih SK terdahulu SK PPKS)

### Strategi/Tindak Lanjut

1. Akan dibuat surat pemberitahuan pengisian SK PPKPT berserta satgasnya dalam format gform
2. Melakukan pendampingan pembaharuan nomenklatur dari SK PPKS menjadi PPKPT

## [S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI

### Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Monev KIPK Palu
2. Bimbingan Teknis PKM
3. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Wilayah XVI
4. Fase Pembinaan Pilmapres Menuju Nasional
5. Melakukan pendataan Organisasi Mahasiswa dalam rangka revitalisasi data ORMAWA
6. Persiapan Penyaluran Ganjil dan Penerimaan Mahasiswa Baru KIPK
7. Koordinasi rutin Triwulan Kemahasiswaan se Wilayah 16
8. Pendampingan Pelaksanaan PKM, PPK Ormawa dan P2MW di lingkungan Wilayah XVI
9. Penyaluran Dana PKM ke PTS
10. HOPE TALK 8-9
11. Pelayanan Aduan terkait KIPK dan Kemahasiswaan

### Progress/Kegiatan

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bagi PTS Wilayah XVI, diikuti 120 peserta dari 45 PTS secara luring dan daring. Hasil pendampingan menghasilkan 27 proposal yang disubmit ke tingkat nasional, dengan 4 proposal lolos pendanaan.
2. Melaksanakan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Tingkat Wilayah XVI Tahun 2026, diikuti 38 mahasiswa delegasi dari 30 perguruan tinggi (PTN/PTS). Ditetapkan 3 mahasiswa terbaik yang diusulkan ke tingkat nasional, dan 1 orang (UNSRAT) dinyatakan lolos ke tingkat nasional.

### Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat ketimpangan kualitas metodologi dan penulisan proposal PKM antar-PTS.
2. Keterbatasan waktu dosen pendamping dalam mengawal ide mahasiswa secara mendalam.
3. Kendala teknis pada proses submit sistem menjelang akhir tenggat waktu karena pengunggahan dokumen menumpuk pada hari terakhir.
4. Rasio kelolosan pendanaan PKM belum sesuai target (4 dari 27 proposal), sebagai dampak kebijakan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

efisiensi pendanaan nasional yang membatasi kuota menjadi 1.250 proposal secara nasional, sehingga target kelolosan 70% (18 Proposal) tidak dapat tercapai.

5. Untuk Kegiatan PILMAPRES, Belum meratanya pemahaman PTS terhadap portofolio capaian unggulan mahasiswa yang diakui secara nasional pada ajang Pilmapres.
6. Kemampuan presentasi gagasan kreatif dalam bahasa asing masih perlu diasah agar lebih kompetitif pada tingkat nasional.
7. Keterbatasan jumlah SDM tim pelaksana serta belum tertibnya basis data kemahasiswaan PTS (kontak dan admin program), sehingga koordinasi pelaksanaan program belum optimal.

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Menginisiasi klinik proposal mandiri yang berjalan lebih awal (pra-Bimtek) agar pematangan ide dan metodologi tidak terkonsentrasi menjelang tenggat.
2. Memperkuat pelatihan khusus bagi Dosen Pendamping PKM untuk meningkatkan mutu pengawalan metodologi dan penulisan proposal.
3. Menyusun timeline internal wilayah yang lebih ketat agar proses unggah dokumen tidak menumpuk pada hari terakhir.
4. Memberikan coaching clinic intensif dan pembekalan (mentoring) bagi perwakilan yang lolos ke tingkat nasional, termasuk penguatan kemampuan presentasi berbahasa asing.
5. Melaksanakan sosialisasi panduan Pilmapres lebih awal kepada seluruh PTS agar penyiapan portofolio mahasiswa dapat dirancang sejak awal semester.
6. Memutakhirkan dan mengarsipkan basis data kemahasiswaan secara tertib, disertai koordinasi berkala dengan bagian kemahasiswaan PTS dan organisasi mahasiswa.
7. Membangun kolaborasi dengan mitra untuk mendukung pembiayaan dan peningkatan kualitas fasilitas kemahasiswaan.

### **[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya**

#### **Rencana Kegiatan/Aktivitas**

1. Pendampingan Administratif Jabatan Fungsional Dosen PTS (End-to-End) Sulawesi Utara (manado)
2. Webinar Emotional Intelligence for Educators (Daring)
3. Pendampingan Studi Lanjut Dosen PTS (Beasiswa S3) (Daring)
4. Pendampingan daring pengajuan kenaikan JAD Lektor Kepala dan Guru Besar
5. Pembukaan ajuan JAD Asisten Ahli dan Lektor berdasarkan peraturan baru

#### **Progress/Kegiatan**

1. Pendampingan Pengajuan LK-GB
2. Pendampingan Administratif Jabatan Fungsional Dosen PTS (End-to-End) Sulawesi Utara

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Proses pengajuan berjalan normal dan saat ini berada dalam fase menunggu hasil penilaian resmi dari Asesor Kementerian sesuai dengan linimasa dan prosedur dari pusat.
2. Ajuan Kenaikan Jabatan dari AA ke Lektor untuk sementara belum dapat dilanjutkan. Hal ini dikarenakan adanya migrasi dan integrasi pengembangan layanan SISTER pada menu Angka Kredit (AK) Prestasi, khususnya pada proses Pengesahan Modul Proporsi Penelitian (dijadwalkan hingga 17 Juli 2026)

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melakukan pengecekan secara periodik pada SISTER untuk memastikan tim SDPT langsung



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

- mendapatkan informasi valid begitu hasil penilaian asesor selesai
2. Melakukan pemantauan berkala secara pasif terhadap pengumuman resmi kementerian dan pembaruan sistem SISTER (pasca 17 Juli 2026) agar tim bisa langsung menginformasikan kepada dosen begitu menu pengesahan proporsi penelitian dibuka kembali.

**[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan**  
**[IKU 3.3] Fasilitas Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS**

**Rencana Kegiatan/Aktivitas**

1. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat di Gorontalo
2. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat di Sulteng
3. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat di Sulut
4. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat di Sulut
5. Sosialisasi Pembentukan Sentra KI di Gorontalo sekaligus penandatanganan PKS
6. Sosialisasi Pembentukan Sentra KI di Sulteng sekaligus penandatanganan PKS
7. Sosialisasi Pembentukan Sentra KI di Sulut sekaligus penandatanganan PKS
8. Workshop pendampingan penelitian dan pengabdian program kolaborasi sosial untuk masyarakat
9. Strategi Penyusunan Roadmap Penelitian Bagi Dosen

**Progress/Kegiatan**

1. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat wil. Gorontalo
2. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat wil. Sulteng
3. Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat wil. Sulut
4. Bimtek Penguatan Peran dan Manajemen Pengelolaan LPPM
5. Bimtek Penulisan Artikel Ilmiah
6. Pembentukan Konsorsium KITA Sulteng
7. Persiapan Pembentukan Konsorsium JAGA Gorontalo

**Kendala/Permasalahan**

1. Kualitas draf proposal dosen masih bervariasi dan belum sesuai dengan standar nasional/sistematika hibah.
2. Keterbatasan waktu dosen dalam menyusun proposal di sela-sela kesibukan mengajar.
3. Belum terbukanya peluang pendanaan penelitian Skema Afirmasi PDP tahun 2026
4. Belum terbuka peluang Batch 2 bagi dosen peneliti yang hasil penelitian dianggap layak oleh reviewer tapi tidak lolos dalam mendapatkan pendanaan
5. Tata kelola administrasi LPPM di beberapa kampus masih manual dan belum terintegrasi secara digital
6. Rendahnya motivasi dan produktivitas dosen dalam menulis artikel ilmiah tembus jurnal bereputasi (Sinta/Scopus) karena kurangnya pemahaman teknik penulisan dengan memanfaatkan AI
7. Belum adanya payung hukum atau nota kesepahaman (MoU/MoA) yang mengikat secara formal untuk pembentukan konsorsium

**Strategi/Tindak Lanjut**

1. Menerapkan metode pendampingan intensif (coaching clinic)
2. Melakukan monitoring berkala pasca-pendampingan hingga proposal benar-benar siap diunggah



**Catatan :**

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

(submit).

3. Melakukan pendataan jumlah proposal yang diajukan dan proposal yang lolos dan tidak lolos pendanaan
4. Menyusun standarisasi pengelolaan tata kelola manajemen LPPM
5. Membuat Focus Group Discussion guna menyamakan visi dan misi konsorsium (KITA Sulteng dan JAGA Gorontalo).

#### **[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)**

##### **[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L**

#### **Rencana Kegiatan/Aktivitas**

1. Penyesuaian Jadwal Palang pada RPD Bulanan
2. Penyesuaian dan Revisi POK
3. Melakukan Pelaporan Capaian Output tepat waktu secara berkala
4. Melakukan pemantauan secara berkala atas Realisasi Belanja dan konsistensi RPD
5. Mengontrol Konsistensi dalam penggunaan dan revolving dana UP dan TUP
6. Penataan Dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran teradmisintras dengan baik

#### **Progress/Kegiatan**

Dalam rangka penyesuaian pelaksanaan program dan anggaran, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA sebagai tindak lanjut atas perubahan alokasi anggaran dan penyesuaian rincian pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan kebijakan revisi anggaran yang berlaku.
2. Melakukan penyusunan dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) guna memastikan proyeksi kebutuhan anggaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direviu.
3. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan melalui reviu terhadap target, jadwal pelaksanaan, serta metode pelaksanaan kegiatan agar tetap mendukung pencapaian sasaran kinerja dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

#### **Kendala/Permasalahan**

1. Revisi penajaman belanja APBN menyebabkan beberapa kegiatan harus dimitigasi melalui penyesuaian metode pelaksanaan, target, maupun waktu pelaksanaannya. Selain itu, terdapat.
2. perubahan metode pelaksanaan kegiatan, dari yang semula direncanakan secara luring menjadi kombinasi luring dan daring atau metode lainnya yang lebih efisien, sehingga memerlukan penyesuaian perencanaan, jadwal, serta kebutuhan anggaran.

#### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melakukan analisis dan reviu serta pemutakhiran dokumen perencanaan serta penganggaran secara berkala sesuai dengan hasil revisi anggaran yang telah ditetapkan.
2. Menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkelanjutan agar selaras dengan perubahan jadwal dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan pemutakhiran hal III DIPA.
3. Melakukan mitigasi terhadap kegiatan yang terdampak melalui penyesuaian metode pelaksanaan, prioritas kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia.
4. Memperkuat koordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan seluruh perubahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat diimplementasikan secara tepat waktu serta tetap mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

### **C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output**



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

| No                    | Rincian Output                                                                                                         | Satuan  | Fisik  |           | Anggaran                |                         |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|                       |                                                                                                                        |         | Target | Realisasi | Alokasi                 | Realisasi               | %         |
| 1                     | [DK.7733.BDB.001]<br>Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu | Lembaga | 45     | 45        | Rp1.989.169.000         | Rp712.616.614           | 35.82     |
| 2                     | [DK.7733.BDB.002]<br>Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapat Layanan Rekomendasi                   | Lembaga | 11     | 11        | Rp17.088.000            | Rp17.086.662            | 99.99     |
| 3                     | [DK.7733.BEJ.001]<br>Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi                                                     | Orang   | 1524   | 1524      | Rp54.226.064.000        | Rp27.134.976.650        | 50.04     |
| 4                     | [WA.7735.EBA.962]<br>Layanan Umum                                                                                      | Layanan | 1      | 0         | Rp158.675.000           | Rp62.550.000            | 39.42     |
| 5                     | [WA.7735.EBA.994]<br>Layanan Perkantoran                                                                               | Layanan | 1      | 0         | Rp15.823.395.000        | Rp13.232.868.514        | 83.63     |
| <b>Total Anggaran</b> |                                                                                                                        |         |        |           | <b>Rp72.214.391.000</b> | <b>Rp41.160.098.440</b> | <b>57</b> |

#### D. Rekomendasi Pimpinan

1. Capaian IKU 1 pada TW II (100%) tetap konsisten melampaui target (99,61%), bahkan berada di atas rata-rata sejumlah LLDIKTI lain secara nasional (rekap IKU 1 2026). saya merekomendasikan pemeliharaan rutin aplikasi SIPINTER dipertahankan dan capaian ini dijadikan bahan showcase pada laporan kinerja ke Kementerian.
2. realisasi IKU 2 pada TW II sebesar 90,47% (target PK 94%, gap -3,53 poin) — praktis tidak berubah dari TW I (90,48%). Pimpinan perlu memastikan angka ini benar-benar mencerminkan progres riil April-Juni, bukan carry-over dari input TW I, mengingat aktivitas signifikan telah dilaporkan pada narasi TW II (Klinik Akreditasi SAPTO 2.0). Terlepas dari itu, 26 PTS teridentifikasi berisiko (13 belum terakreditasi, 13 akan habis masa berlaku akreditasi institusi pada 2026) — perlu untuk melakukan pemetaan prioritas dan pendampingan khusus bagi PTS berisiko tinggi ini sebelum TW III.
3. Perlu atensi khusus pada dua area ZI WBK yang belum memenuhi ambang batas penilaian TPSK (Area Manajemen Perubahan: 4,00 dari minimal 4,80; Area Penataan Tatalaksana: 3,43 dari minimal 4,20), manajer area terkait agar melengkapi bukti dukung secara definitif. Meski Survei Persepsi Anti Korupsi (98,21%) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (95,30%) berkategori Sangat Baik, skor terendah (93,6%) pada aspek informasi layanan, ketepatan waktu, dan kesesuaian tarif memerlukan tindak lanjut konkret. Kebijakan efisiensi anggaran 2026 turut menghambat sejumlah kegiatan SAKIP; pimpinan perlu melakukan reprioritisasi anggaran agar output kunci tetap tercapai pada TW III-IV.
4. realisasi IKU 4 pada TW II sebesar 35,71% (target PK 59,5%, gap -23,79 poin) — angka identik dengan TW I, mengindikasikan Workshop Penguatan PPEPP yang telah dilaksanakan pada TW II belum berkontribusi pada capaian terukur. rencana pembinaan berbasis kluster (differentiated treatment) yang diusulkan BELMAWA sebagai strategi resmi TW III dapat disetujui.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**

5. lakukan verifikasi lapangan segera atas status riil kepatuhan SK PPKPT, dengan target definitif dengan tenggat jelas. berikan atensi bagi PTS yang tidak responsif, mengingat stagnasi telah berlangsung dua triwulan berturut-turut tanpa perbaikan. manfaatkan momentum PKKMB pada TW 3 untuk meningkatkan capaian pada IKU 5 ini.
6. segera lakukan verifikasi status pembukaan kembali sistem dan percepat pengajuan berkas dosen yang telah lengkap (termasuk pergerakan 199 dosen pada jenjang Asisten Ahli) begitu sistem kembali normal, agar tidak terjadi penumpukan menjelang akhir tahun. Realisasi 0% pada semester I menuntut percepatan signifikan pada semester II.

Gorontalo , 20 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan  
Tinggi Wilayah XVI

Munawir Sadzali Razak



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**